

# **DAFTAR JUDUL KOLEKSI SKRIPSI**

## **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**umsurabaya**  
Morality, Intellectuality, and Entrepreneurship

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURABAYA**

**MIRDAFTAR JUDUL SKRIPSI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**JURUSAN : HUKUM**

NO	NIM	NAMA	JUDUL	TAHUN
1)	84120001	MOHAMMAD FAHMY Z 01.MOH	HASIL TES DNA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PIDANA (STUDI PRESPEKTIF KUHAP DAN HUKUM ISLAM)	1988
2)	00120081	WAHYUDIN AHMADI 02.WAH	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI	2004
3)	01120018	RUKANI 03.RUK	TINJAUAN YURIDIS KEWENAGAN PENGADILAN DALAM MEMUTUS SENGKETA PILKADA (STUDI KASUS PILKADA DEPOK)	2005
4)	01120029	SITI AMINAH 04.SIT	PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTAMNG PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KASUS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “LISA”	2005
5)	01120043	SARINI IKA RAHMAWATI 05.SAR	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS SERTIFIKAT DAN UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA/ TUMPANG TINDIH	2005
6)	01120085	MARDIYANTO 06.MAR	TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA KAITANYA DENGAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENCAKUM TANGGAL KADALUARSA	2005
7)	02120009	FARIDA 07	PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997	2006
8)	02120021	SULAIMAN EFENDI 08.SUL	PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA	2006
9)	02120025	SHOLEKHAN ARIF 09.SOL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM HAL KEADAA HAID DAN MELAHIRKAN ATAU GUGUR KANDUNGAN	2006
10)	03120016	ST. HAJAR AL-JIHAD K.S 10. ST.H	KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI TINDAK KEJAHATAN	2007

11)	03120028	IBRAHIM EBU 11. IBR	PENCEGAHAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM AYATI DAN EKOSISTEMNYA	2007
12)	03120023	RIDWAN NUR 12. RID	HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUSAHA DENGAN MAKELAR SEBAGAI PIHAK PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERNIAGAAN DI KOTA KUPANG	2007
13)	03120042	DORKAS DJAMI 13. DOR	PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI OLEH PELAKU USAHA TOKO SWALAYAN (DITINJAU DARI ASAS KEPANTASAN)	2007
14)	03120020	AGUS TRIYONO 14. AGU	TANGGUNG JAWAB HUKUM PRODUSEN PADA KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN TANPA PENCANTUMAN JANGKA WAKTU DALUARSA MENURUT UU NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	2007
15)	03120034	JAN RUDOLF TULLE 15. JAN	KEWENANGAN DIREKTORAT POLISI PERAIHAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM KASUS PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BOM RAKITAN DI PERAIRAN TELUK KUPANG	2007
16)	03120051	LADIA PALA SOGE 16. LAD	TINJAUAN YURIDIS MENGENAI CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN	2007
17)	03120046	FREDERICK MAUKAFELI 17. FRE	PENERAPAN PIDANA PENJARA DI PENGADILAN NEGERI LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR	2007
18)	03120049	KRISTOFORUS KESO 18. KRI	WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SECARA LISAN DI KELURAHAN FONTEIN KECAMATAN OEBODO KOTA KUPANG	2007
19)	03120072	MARIA SAKU 19. MAR	KONTROL MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD KABUPATEN KUPANG MENUJU TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH YANG LEBIH BAIK DAN DEMOKRATIS	2007
20)	03120030	BERNARDUS J.W. MALE 20. BER	UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KETIKA TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999)	2007
21)	03120066	MUHAMMAD ANDRA WARDANA 21. MUH	DISPARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTARA HAKIM DENGAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG	2007
22)	03120044	CHAIDIR 22. CHA	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN LISTRIK (PLN) DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 (STUDI DI KABUPATEN FLORES TIMUR)	2007

23)	03120027	SYARIF PATI PILOHI 23. SYA	TANGGUNG JAWAB ADPEL ATAS KASUS TENGGELAMNYA KMP CITRA MANDALA BAHARI	2007
24)	03120025	DJAINUDIN 24. DJA	PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM KASUS POEMBUUHAN DI KUPANG	2007
25)	03120036	OSCAR O. REMBETH 25. OSC	KEJAHATAN PEMERKOSAAN DALAM LINGKUNGAN SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS	2007
26)	03120034	FITRIAH SUKAESI HADI 26. FIT	KEWENANGAN PUPN DALAM MENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAHAN DIKOTA KUPANG	2007
27)	03120063	RUDY CAHYA KURNIAWAN 27. RUD	VISUM REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT PUTUSAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 102/PID.B/1998/PN Pbg)	2007
28)	03120053	MATHEUS SIRA 28. MAT	ANALISIS TENTANG KEJAHATAN DUNIA MAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA	2007
29)	03120060	HILDEGARDIS S. DOMAKING 29. HIL	ASPEK HUKUM TERADAP PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN FLORES TIMUR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN HASIL HUTAN	2007
30)	03120080	JONI. K TIRAN 30. JON	KEABSAHAN PENGAMBILAN DANA TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA SEBELUM DITETAPKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI DI DPRD KOTA KUPANG)	2007
31)	03120048	KADIR LOU 31. AKD	PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP ISTRI DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	2007
32)	03120045	DOMINGGUS MASNENO 32. DOM	PELAKSANAAN PENGAWASAN KOMISARIS TERHADAP KEBIJAKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI KABUPATEN FLORES TIMUR	2007
33)	03120055	NELCI APLIANA B. KIRE 33. NEL	HAMBATAN HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN LARANTUKA	2007
34)	03120078	HETI PATMAWATI 34. HET	HAMBATAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA GUGATAN TENTANG TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS I KUPANG	2007

35)	03120074	MEILANI ARDIYATI 35. MEI	STUDI TENTANG PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-BELI KENDARAAN BERMOTOR (SEPEDA MOTOR) PADA PT SURYA MAHKOTA KENCANA DI KOTA KUPANG	2007
36)	03120058	ROFINUS DALO 36. ROF	HAMBATAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LARANTUKA	2007
37)	03120029	KORNELIS TAKUS 37. KOR	SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HUBUNGAN SEKS DI LUAR NIKAH OLEH REMAJA DI KOTA KUPANG	2007
38)	03120043	SRI MULYAWATI 38. SRI	TINJAUAN YURIDIS TENANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU	2007
39)	03120032	BERNADUS LAITABUN 39. BER	HAMBATAN-HAMBATAN DIREKTORAT POLISI AIR DAERAH NTT DALAM MENANGANI KEJAHATAN PENYELUNDUPAN BARANG DI PELABUHAN TENAU KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG	2007
40)	03120021	ZAINAL LEWAIMANG 40. ZAI	PENGARUH PIDANA PENJARA TERHADAP KELUARGA NARAPIDANA DI KABUPATEN KUPANG	2007
41)	03120059	WILIBRORDUS W. PLATIN 41. WIL	TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN WAN PRESTASI PADA PDAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWJIBAN SESUAI PERJANJIAN DENGAN PELANGGAN AIR MINUM DIKABUPATEN FLORES TIMUR	2007
42)	03120039	SIMON MALELAK 42. SIM	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERBANKAN (DALAM PROSES PERADILAN PIDANA)	2007
43)	03120037	YOSEPH DDADHU 43. YOS	TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK TOKO DALAM KASUS KEMASAN MAKANAN KADALUARSA	2007
44)	03120013	HASAN SUWARI SELOLONG 44. HAS	ASAS HUKUM PIDANA PADA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA	2007
45)	03120075	MELKIANUS LANDUNAU 45. MEL	PEMOTONGAN UPAH SAAT CUTI MELAHIRKAN	2007
46)	03120065	MOH. ARSYAD 46. MOH	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN ANDON DI PERAIRAN KOTA KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2007

47)	03120062	EKO TJAHYO UNTORO 47. EKO	FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIK DALAM MEMPROSES PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH UKUM POLRESTA KUPANG	2007
48)	03120022	SUKISMİ 48. SUK	ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (STUDI KASUS KRIMINOLOGI DI POLRESTA KUPANG)	2007
49)	03120056	ABDUL RAMAN ABA MEAN 49. ABD	TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR	2007
50)	03120018	ABDULRAHMAN MAKARIM 50. ABD	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KUPANG)	2007
51)	03120038	ABDURAHMAN H.L. RASYID 51. ABD	KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUPANG DALAM USAHA PERIKANAN TANGKAP DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER. 17/MEN/2006 TENTANG USAHA PERIKANAN TENKAP	2007
52)	03120040	NATALIA E. KALAMPUNG 52. NAT	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DALUARSA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA KUPANG	2007
53)	03120068	MUSTAVIA ADJIHARI 53. MUS	PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	2007
54)	03120047	HENDRICUS G. TUKAN 54. HEN	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PADA LOKASI PEMBANGUNAN HOTEL MOKANTARAK LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR	2007
55)	03120024	SYARIFUDIN LA ELA 55. SYA	TANGGUNG JAWAB ASURANSI TERHADAP SANTUNAN CLAIM MENINGGAL DUNIA PADA NASABAH BUMI PUTERA 1912 DI KABUPATEN ALOR	2007
56)	03120026	ZULQIFLI BALA 56. ZUL	PENGARUH MENGKONSUMSI MINUMAN TERHADAP TINDAK PENGANAYAAN DI KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN OEBODO KOTA KUPANG	2007
57)	03120050	SEPRIANUS BELPLAY 57. SEP	HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI LARANTUKA	2007
58)	03120064	WARSINO 58. WAR	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN NYATA(INDAKTA) DI PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG	2007

59)	03120069	PASFIKUS KOPONG BEDA 59. PAS	KAJIAN POTENSI KONFLIK BERDASARKAN KETAATAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN FATULEU KABUPATEN KUPANG SESUAI NORMA HUKUM YANG BERLAKU	2007
60)	03120070	MUHAMMAD SYAHRIR 60. MUH	HAK PEMBANTU TUMAH TANGGA ATAS UPAH MINIMUM DI KELURAHAN FATULULI OEBODO KOTA KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2007
61)	03120015	TARSISIUS L. DE'ONA 61. TAR	KEABSAHAN PERKAWINAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA	2007
62)	03120052	LINUS BOLI JAGA 62. LIN	PEGAKAN HUKUM KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA LARANTUKA	2007
63)	03120057	RAFAEL DURAN NAMA 63. RAF	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA PRIMKOPABRI DI LARANTUKA	2007
64)	03120043	NUR ALAM SYARIF 64. NUR	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEKERASAN TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR	2007
65)	03120004	RAHMA SUSANTI 65. RAH	PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN	2007
66)	04120004	FADLAN 66. FAD	PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	2008
67)	04120003	DWI SETYA RAHMAWATI 67. DWI	KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE	2008
68)	05120004	DHIKA MOHAKA 68. DHI	PENYIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA	2009
69)	05120042	AHMAD SHOFIN NUZIL 69. AHM	KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	2009
70)	01200037	MOCHAMMAD HERU KURNIAWAN 70. MOC	PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM	2005

71)	05200034	NUR KASAN 71. NUR	PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA DALAM RANGKA INVESTASI DI INDONESIA	2009
72)	05200030	MUJIBUR ROKHMAN 72. MUJ	PERLINDUNGAN UPAH BAGI PEKERJA OUTSOURCING	2009
73)	05 120 036	DODIK SUJATMIKO 73. DOD	PERTANGGUNG JAWABAN LINGKUNGAN PADA SENGKETA YANG TIMBUL DARI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	2009
74)	06 120 013	YOGI SANDA PRAHITA 74. YOG	PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIK POLRI DALAM HAL TERjadinya SALAH PENANGKAPAN ATAU " ERROR IN PERSONA " STUDI KASUS IMAM HAMBALI ALIAS KEMAT JOMBANG TAHUN 2008	2010
75)	06 120 009	M. MUKLIS 75.MUK	PENYIMPANGAN PENGUSAHA TERHADAP KLAUSULA PKB (PERJANJIAN KERJA BERSAMA)/ TENTANG PEMBERIAN JASA PRODUKSI KEPADA PEKERJA	2010
76)	06 120 018	SITI ZULAIKHA 76.SIT	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN CURANG PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	2010
77)	06 120 010	BAYU ADI SAPUTRA 77.BAY	PENGATURAN EUTHANASIA DALAM HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA	2010
78)	05 120 016	ADE ASMARA DHANA 78.ADE	KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	2009
79)	06 120 016	MOH. AINUL MUSTOFA 79.MOH	AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN	2010
80)	06 120 015	PERDANA RAHARDIAN PUTRA 80.PER	TINDAK KEJAHATAN PENCABULAN SEJENIS PADA ANAK DITINJAU DARI PASAL 292 KUHP DAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	2010
81)	06 120 014	RINDAH SRI WIDARTI 81.RIN	PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT RUMAH YANG DI REALISASIKAN DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN	2010
82)	07 120 010	FIFANTIN ELIZA 82.FIF	JUAL BELI TANAH OLEH PT. LAPINDO BRANTAS TERHADAP WARGA KORBAN LUMPUR LAPINDO	2011

83)	07 120 012	FERY ARDIANTO 83.FER	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA UNTUK MEMBERIKAN KETERJANGAN SECARA BEBAS DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHP	2011
84)	07 120 015	RUSLAN AFANDI 84.RUS	WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI BERUPA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA CYBER PORNOGRAPHY	2011
85)	07 120 016	YULIE ASTRIANA 85.YUL	KEDUDUKAN PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	2011
86)	07 120 031	BAYU HANDRIANZAH 86.BAY	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PESAN PREMIUM	2011
87)	07 120 018	ARIS SISWONO 87.ARI	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PENCOBLOSAN ULANG ATAS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU KADA ( Studi Kasus : Pemilukada Gresik Tahun 2010)	2011
88)	05 120 006	M. BACHRUL ULUM 88.BAC	STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006	2009
89)	06 120 021	MISBAKHUL MUNIR AL AQIB 89.MIS	PENCABUTAN LAPORAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	2010
90)	08 120 043	MUHAMMAD HULI 90.MUH	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS	2012
91)	08 120 150	YOGA SUGAMA ALI F. 91.YOG	PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA ELLEGAL LOGGING KAITANNYA DENGAN MORATORIUM LOGGING	2012
92)	08 120 035	SUPRAPTO 92.SUP	PENGATURAN PRODUK UNIT LINK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERASURANSIAN	2012
93)	08 120 037	NOVI DWI YANTI 93.NOV	PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMBERITAAN PERS	2012
94)	08 120 039	MARIYAH YUSTIYANAH 94.MAR	PENGGUNAAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN	2012

95)	08 120 040	OKTAF DRAJAD N. 95.OKT	PENGGUNAAN KENDARAAN PERSEORANGAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	2012
96)	08 120 044	ARY MURTI 96.ARY	IMPLEMENTASI DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF PADA PENGADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI HAK-HAK ANAK	2012
97)	08 120 045	NURVIDA SHANTI 97.NUR	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA BARANG ATAU JASA TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA BARANG ATAU JASA (STUDI KASUS CV X DAN DINAS Y DI PROPINSI JAWA TIMUR)	2012
98)	08 120 047	NURDIAN AYU R. M . E. 98.NUR	PEROLEHAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK PAKAI ATAS TANAH DI INDONESIA	2012
99)	08 120 048	PURWAJI DANNISWARI 99.PUR	HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA LISAN	2012
100)	08 120 056	SARMAIDIN HARAHAP 100.SAR	TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL	2012
101)	08 120 058	AZIZAH WULANDARI 101.AZI	KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH	2012
102)	08 120 027	AKHMAD MUSTOFA 102.AKH	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN	2012
103)	06 120 037	ROSY SUDARNO 103.ROS	KEABSAHAN PENARIKAN KEMBALI BARANG JAMINAN YANG TIDAK DI DAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA	2010
104)	06 120 071	HERIMANTO 104.HER	HAK ATAS UPAH MINIMUM BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA	2010
105)	07 120 109	MURSYID 105.MUR	TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL FACEBOOK	2011
106)	07 120 021	YUTICIA HERLAMBANG 106.YUS	PEMIDANAAN DENDA ANAK NAKAL YANG TERLIBAT TINDAK PERKARA PENCABULAN	2011

107)	07 120 131	THERESIA NONA LENY 107.THE	WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PERSELISIHAN PEMILUKADA	2011
108)	07 120 032	LAURENSIUS LARU S. 108.LAU	PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	2011
109)	07 120 049	ERICH LEONARD SABA 109.ERI	PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN	2011
110)	07 120 087	I GUSTI AGUNG SUCANA 110.IGU	PIDANA PENJARA ANAK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PEMINDANAAN (Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 132/PID.B/2010/PN.MMR.)	2011
111)	07 120 093	RAHMAN AHMAD 111.RAH	ANALISIS YURIDIS GUGURNYA HAK PENUNTUTAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	2011
112)	07 120 097	ZUL HALIM 112.ZUL	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PASANGAN PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN	2011
113)	08 120 005	TRIANA N. HENTIHU 113.TRI	AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK PERWALIAN ANAK TERHADAP STATUSNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM	2012
114)	08 120 008	DARMAWAN YUSUF 114.DAR	LARANGAN TERHADAP ORANG YANG MENGIDAP PENYAKIT BERADA DI JALAN JALUR HIJAU TAMAN DAN TEMPAT UMUM LAINNYA, SEBAGAI PELANGGARAN HAM	2012
115)	08 120 038	AIRLANG KURNIANGGA 115.AIR	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	2012
116)	08 120 070	GORDEN AINOR L.D. 116.GOR	KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBANKAN	2012
117)	09 120 018	VINSENSIUS VIVANO B. 117.VIN	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS KERUGIAN YANG DI TIMBULKAN HEWAN PELIHARAAN (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR TAHUN 10 TAHUN 2007)	2013

118)	09 120 056	YOSEPH BOM 118.YOS	PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA LAMPUNG (Studi Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang)	2013
119)	09 120 059	BERNADUS TOKAN 119.BER	PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS, PELANGGARABN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM)	2013
120)	09 120 082	ADRIANA MARITJE PAH. 120.ADR	TUJUAN YURIDIS DISPARITAS PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	2013
121)	07 120 018	AGUSTINUS FANTI 121.AGU	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN	2011
122)	07 120 029	MOHAMMAD ANANG MA RUF 122.MOH		2011
123)	07 120 050	NOBERTUS SNELLIUS LALO 123.NOB	DISSENTING OPINION TENTANG PENAFSIRAN ILLEGAL LOGGING DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN	2011
124)	07 120 051	WIWI PUSPITA SARI M 124.WIW	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	2011
125)	07 120 052	JOKO SUSILO P. CAHYONO 125.JOK	MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)	2011
126)	07 120 071	ANDRIAN YOSAFAT M 126.AND	ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES PERADILAN	2011
127)	07 120 078	YANSE MARISCA BARBOSA 127.YAN	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN	2011
128)	08 120 004	ALIF BFIRMANSYAH 128.ALI	PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS	2013

129)	09 120 017	JORHAN B. TEFA 129.JOR	HAK KORBAN KECELAKAAN DI LUAR ALAT ANGKUTAN LALU LINTAS JALAN, UNTUK MENDAPAT DANA SANTUNAN DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)	2013
130)	09 120 060	RAYMUNDUS MEGA 130.RAY	PENERAPAN PEPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN PROYEK PEMERINTAH DAERAH	2013
131)	09 120 065	EMANUEL PASSAR 131.EMA	KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN DALAM MEMPROSES IZIN PENYIARAN	2013
132)	09 120 072	HAIRUDIN DAENG NANDRO 132.HAI	HAK WANITA DALAM PEMBAGIAN MENURUT HUKUM ADAT MANGGARAI (Studi khusus hak anak perempuan dalam pembagian harta warisan orang Manggarai di Kabupaten Manggarai)	2013
133)	09 120 077	ANDI KARMILA SYARIL 133.AND	PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALURAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA	2013
134)	09 120 081	SHINTA TRI KOMARA 134.SNI	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENSIA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER	2013
135)	07 120 039	ACHMADIN SULAIMAN S.D 135.ACH	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP RESIKO KECELAKAAN DI LAUT	2013
136)	07 120 050	NOBERTUS SNELLIUS LALO 136.NOB	DISSENTING OPINION TENTANG PENAFSIRAN ILLEGAL LOGGING DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN	2013
137)	09 120 079	AWAN DRAMAWAN 137.AWA	KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA PERSIDANGAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN	2013
138)	07 120 007	MUCHLIS JOHAN WAHYUDI 138.MUC	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA PARKIR TERHADAP KALUSULA BAKU DALAM KARCIS PARKIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	2013
139)	09 120 019	BENNY NUGROHO 139.BEN	SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN RINGAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2012	2013

140)	09 120 041	MOH. RESKI DESIRIYANTO 140.MOH	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	2013
141)	09 120 042	CAHYO AGI WIBOWO 141.CAH	PENELOKAN PELAYANAN MEDIS OLEH RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN YANG MEMBUTUHKAN PERAWATAN DARURAT	2013
142)	09 120 048	HARI PURWANTO 142.HAR	KETENTUAN UPAH MINIMUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERUSAHAAN PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA TENAGA KERJA	2013
143)	09 120 049	MEGA SULISTIOWATI 143.MEG	AKIBAT HUKUM POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH	2013
144)	09 120 051	RESMA ATIKA ARUM 144.RES	PENGGUNAAN ZAT CATHINONE DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	2013
145)	09 120 025	TAMIM AMIRUDIN IKHSAN 145.TAM	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK WEBSITE CYBERPORN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI	2013
146)	07 120 026	SEPTI TRIANI DEWI 146. SEP	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PARKIR BERLANGGANAN TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI KABUPATEN SIDOARJO	2013
147)	09 120 029	RIZKY FERDINA SATRYA 147.RIZ	PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA	2013
148)	09 120 038	MUHAEMIN 148.MUH	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI DALAM PELAKSANAAN KOMANDO MENURUT PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA	2013
149)	09 120 047	YAN BASTIAN 149.YAN	DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	2013
150)	09 120 054	ERIEC YONANTHA 150.ERI	PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMBERITAAN PERS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS GUNA Menghindari KRIMINALISASI PERS	2013

151)	09 120 006	KHALIMATUS SA'DIYAH 151.KHA	KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	2013
152)	09 120 020	AHMAD KHUDLORI 152.AHM	TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BREEDING FARM YANG MELAKUKAN PENCEMARAN YANG DIAKIBATKAN PROSES SANITASI DAN BIOSECURITY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	2013
153)	09 120 033	CHOLIFAH ASYHADIAH 153.CHO	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG SERTIFIKATNYA TELAH DIJAMINKAN SECARA SEPIHAK OLEH DEVELOPER KEPADA BANK	2013
154)	09 120 002	AHMAD FAISAL TANTOWI 154.AHM	PERLINDUNGAN UMKM ATAS BIDANG USAHA TERBUKA BAGI UPAYA KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2013
155)	09 120 003	WIWIN OKTAVIA SUGITO 155.WIW	TANGGUNG GUGAT PT KAI ATAS KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API	2013
156)	09 120 023	MUHARTI 156.MUH	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMER 46/PUU-VIII/2010	2013
157)	09 120 028	SUCI MAHARANI 157.SUC	KEABSAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	2013
158)	04 120 074	AHMAD SYARIF 158.AHM	PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/ BURUH TERHADAP UPAH MINIMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	2013
159)	09 120 074	ASEP ANDRI NUGROHO 159.ASE	TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU USAHA ATAS PEMASANGAN IKLAN YANG MENGANDUNG INFORMASI TIDAK BENAR	2013
160)	09 120 052	ZUDHI MUSLIKH 160.ZUD	PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN JALAN RUSAK	2013
161)	08 120 028	INDAH WATI 161.IND	KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH	2013

162)	09 120 004	SULTHON AMIN 162.SUL	TANGGUNG GUGAT PEMILIK ANGKUTAN UMUM KEPADA PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN	2013
163)	09 120 011	SUGIANTO 163.SUG	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT KORBANPERKOSAAN	2013
164)	2011 1440 001	DEWI SARTIKA 164.DEW	KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI NOMOR 365 K/PiD/2012	2015
165)	2011 1440 003	SAHURA 165.SAH	HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENDERITA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN	2015
166)	2010 1440 005	LINA DIRIN 166.LIN	HAK ATAS UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA	2014
167)	2010 1440 011	JOSE MARTINS XIMENS 167.JOS	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK LINTAS WILAYAH DISTRIC OECUSSE (REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE)	2014
168)	2010 1440 013	ANDIKA PRASTIawan 168.AND	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA PAILIT	2014
169)	2010 1440 019	AYU RACHMAWATI ZANY 169.AYU	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG	2014
170)	2010 1440 027	IQRO BAIQ ZAKARYA 170.IQR	KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS	2014
171)	2010 1440 035	MASLIK HANUM 171.MAS	PELANGGARAN JANGKA WAKTU ATAS DASAR PKWT STUDY KASUS DI PT. "X"	2014
172)	2010 1440 040	RAHMAT HANAFI 172.RAH	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA	2014

173)	2010 1440 043	SEPTIYO RIZAL ALHABIB 173.SEP	ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 52/K/Pid.Sus/2013	2014
174)	09 120 026	MULIADI 174.MUL	TANGGUNG GUGAT PERDATA PT MINARAK LAPINDO BRANTAS INC TERHADAP KORBAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO	
175)	2010 1440 025	RAJA MEIDAYANTO H. 175.RAJ	UPAYA HUKUM NASABAH YANG DIEKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PERJANJIAN LEASING SEPEDA MOTOR	2014
176)	2011 1440 014	TAUFIK HIDAYAT 176.TAU	KEDUDUKAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA	2015
177)	09 120 044	BUYUNG AKBAR VELAYATI 177.BUY	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA ATAS KETERLAMBATAN GAJI YANG DILAKUKAN OLEH KLUB SEPAK BOLA	
178)	09 120 045	BALQIS WAHYU FIRDAUS 178.BAL	JAMINAN AKRIDITASI ATAS TANAH BELUM BERSERTIFIKAT SEBELUM DAN SEJAK BERLAKUNYA UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN	
179)	2011 1440 008	SATRIA UNGGUL WICAKSANA 179.SAT	ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM ASEAN CHARTER ASEAN CHARTER BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CHARTER	2015
180)	2011 1440 002	SALEH IBRAHIM 180.SAL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELANGGAR PKB DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003	2015
181)	2010 1440 007	AL IZZA AYU WARDANI 181.ALI	KOMPONEN HIDUP LAYAK DALAM SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA	2014
182)	2010 1440 017	AKHMAD ALIMIN 182.AKH	KAJIAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	2014
183)	2010.1440.016	ANGGA GUNAWAN 183.ANG	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SEKALI	2014

184)	2010.1440.045	ULUL ADZEMI ROMANSYAH 184.ULU	PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA : STUDI KASUS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL INDONESIA	2014
185)	2011.1440.004	ROBBY TRI KHUNCAHYONO 185.ROB	TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO ) ATAS KETERLAMBATAN ATAU HILANGNYA PAKET POS	2015
186)	2010.1440.003	SAHURA 186.SAH	HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENDERITA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN	2014
187)	2012.1440.003	PRASTOWO BUDI CAHYONO 187.PRA	HIBAH PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA	2016
188)	2012.1440.014	ADITYA AYU HAKIKI 188.ADI	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM SENGKETA JUAL BELI ONLINE	2016
189)	07.120.005	MOCHAMAD LOETFI 189.MOC	INVASI MILITER ISRAEL TERHADAP PALESTINA DITINJAU DARI PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	2011
190)	2011.1440.012	NURHAYATI BAKIR 190.NUR	TANGGUNG GUGAT PROFESI NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS	2015
191)	2010.1440.022	EDY SETIAWAN 191.EDY	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BANGUNAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA ATAS KELALAIAN PENGUSAHA	2016
192)	2013.1440.003	MUHAMMAD NAUFAL ALI S. 192.MUH	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP	2017
193)	2013.1440.004	UMAR ALAMUDI 193.UMA	TANGGUNG GUGAT PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG MENYEBABKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	2017
194)	2013.1440.006	YARITZA MUTIARANINGTYAS 194.YAR	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH IBU KANDUNG	2017

195)	2013.1440.009	ROHMAT SYAHRI ROMADHONI 195.ROH	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLITASI SEKSUAL	2017
196)	2012.1440.016	ABDUL ROUP 196.ABD	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP PASCA PERMA NO. 13 TAHUN 2016	2017
197)	2012.1440.012	SYAFRIL ERNANDI 197.SYA	ANALISIS CLAIM NELAYAN TIONGKOK ATAS TRADISIONAL FISHING GROUND DI PERAIRAN NATUNA	2017
198)	2013.1440.056	ADISTA AL ARIANTO 198.ADI	KEWENANGAN KOMANDAN SATGAS DALAM KOMANDO PENANGKAPAN PELAKU ILLEGAL FISHING	2017
199)	2013.1440.018	ABDUL MUNIB 199.ABD	KEABSAHAN KLAUSULA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP) DENGAN PEMBERI KERJA TENTANG WAKTU KERJA	2017
200)	2014.1440.006	ASTIKA RACHIM 200.AST	ANALISIS YURIDIS TENTANG DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA “BULLYING”	2018
201)	2014.1440.007	AFIFAH PUTRI 201.AFI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING	2018
202)	2014.1440.009	EVA NOVITA SARI 202.EVA	PERTANGGUNG JAWABAN KOORPORASI SEBAGAI ELAKU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	2018
203)	2014.1440.013	TAUFIQUROCHIM 203.TAU	HAK UBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI YANG BERSIFAT TERBUKA DARI PENGADILAN TIPIKOR	2018
204)	2014.1440.022	CHRISTY WAHYUNI ERWINATA 204.CHR	KELALAIAN ENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN OLEH KREDITUR BAGI PIHAK KETIGA	2018
205)	2014.1440.106	AGUNG HIDAYAT 205.AGU	KEABSAHAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA MENGGUNAKAN TENAGA PENDAMPING	2018

206)	2014.1440.108	KODAR RAF SANJANI 206.KOD	KEABSAHAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM HUBUNGAN KERJA	2018
207)	2014.1440.020	L.YA ESTY PRATIWI 207.LYA	HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA AKIBAT PENGUNDURAN DIRI SEPIHAK DARI KEANGGOTAAN ASEAN	2018
208)	2014.1440.116	MIKAIL ABDUL BASYIT 208.MIK	PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP PELANGGAN NAMA DOMAIN DI INTERNET	2018
209)	2014.1440.002	MUHAMMAD SATRIYADI 209.MUH	PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIYAAN DI JALAN RAYA	2018
210)	2014.1440.101	FARIHATUL LUJJAH 210.FAR	HAK WARIS YANG MELEKAT PADA RUMAH SUSUN MILIK WNA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN	2019
211)	2015.1440.098	HAIRURRAHMAN 211.HAI	PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DITINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA TERORISME	2019
212)	2015.1440.050	FIFIE FRESSILLIA 212.FIF	PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG UNSUR KLAUSULA	2019
213)	2015.1440.065	LUDIA KARTIKA WISANTI 213.LUD	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI SEBAGAI PELAKU CYBERPORN	2019
214)	2015.1440.095	SITI CHOMARIA 214.SIT	HAK GUGAT KONSUMEN TERHADAP PROMOSI YANG TIDAK BENAR DI MEDIA ELEKTRONIK	2019
215)	2015.1440.075	ARIF RAHMAN HAKIM 215.ARI	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN	2019
216)	2015.1440.097	DENNIS RIAN PRADITA 216.DEN	TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM KASUS SALAH TANGKAP	2019
217)	2015.1440.088	ZULHILMI RIZKI FILHAJ 217.ZUL	KEWENANGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI ATAS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL	2019

218)	2015.1440.082	RANTIKA DWI SANTI 218.RAN	TANGGUNG GUGAT BPJS ATAS TIDAK TERTANGGUNGSY VAKSIN HEPATITIS-B	2019
219)	2015.1440.049	CHOLIFAH 219.CHO	HAK AHLI WARIS ATAS PENERBITAN SHM PENGGANTI HILANG/RUSAK	2019
220)	2015.1440.089	RAHMAN ARDI 220.RAH	AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA SECARA SEPIHAK OLEH FRANCHISOR SEBELUM BERAKHIRNYA KONTRAK	2019
221)	2015.1440.083	DESY RUSDIANA NUR R.H 221.DES	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK SAAT MASA KONTRAK KERJA BERLANGSUNG	2019
222)	2015.1440.085	ANNISA WAHYU NINGRUM 222.ANN	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DI NEGARA LAIN	2019
223)	2015.1440.090	MUCHTAR HADI FIRDAUS 223.MUC	HAK GUGAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	2019
224)	2015.1440.079	KINANTI SEKARAYU 224.KIN	PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA TERHADAP BOCORNYA PIPA KILANG MINYAK	2019
225)	2015.1440.047	SAMSUL ARIFIN 225.SAM	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME	2019
226)	2015.1440.071	BAMBANG SOLEHA 226.BAM	HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DENGAN PERUSAHAAN OJEK ONLINE	2019
227)	2015.1440.036	AULIA SEPTIAS 227.AUL	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	2019
228)	2014.1440.005	DEDY STANSYAH 228.DED	PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA DI ASEAN	2019
229)	2015.1440.024	BUNAYATUS SAKINAH 229.BUN	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPHK AKIBAT KECELAKAAN KERJA	2019

230)	2015.1440.018	MASYITHO RACHMAWATI 230.MAS	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG KEHINGAN HAK UNTUK BERIBADAH	2019
231)	2014.1440.018	MIFTAHUL ULUM 231.MIF	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING	2019
232)	2015.1440.042	FIRDAILHAMI NURIZKY 232.FIR	TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN	2019
233)	2014.1440.023	RIZQULLAH MUHAMMAD 233.RIZ	PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICK LIABILITY) PADA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN	2019
234)	2015.1440.069	OKTAVIA WULANDARI 234.OKT	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN ATAS RUSAKNYA JALAN UMUM	2019
235)	2015.1440.057	EDI PURNOMO 235.EDI	KEWENANGAN PENGELOLAAN ASET NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NASIONAL INDONESIA	2019
236)	2015.1440.030	AHMAD BAIDOWI 235.AHM	UPAYA HUKUM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA	2019
237)	2015.1440.016	RAHMAWATI 237.RAH	TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN EKSPEDISI ATAS KELALAIAN ASURANSI PENGANGKUTAN	2019
238)	2015.1440.033	RIDHO RIZKY YOGA PRATAMA 238.RID	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN ORANG TUA KANDUNG	2019
239)	2014.1440.107	AHMAD JAYADI 239.AHM	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE	2019
240)	2015.1440.037	ZAINUL IBAT 240.ZAI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS FISIK KARENA KECELAKAAN KERJA	2019
241)	2015.1440.003	MOCH.SYAIFUDIN BARIZAH 241.MOC	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU	2019

242)	2015.1440.032	DICKY CAHYO AGUNG WICAKSONO 242.DIC	PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA YANG MENGGANTI DIGITAL EXPIRED PADA MAKANAN KADALUARSA	2019
243)	2015.1444.0006	DANU PUTRA WIJAYATMOKO 243.DAN	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI	2019
244)	2013.1440.020	M.AGUS WIYONO 244.AGU	KEABSAHAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF	2017
245)	2013.1440.023	FADLI 245.FAD	KEABSAHAN SUBYEK HUKUM DALAM SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK ATAS TANAH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH	2017
246)	2013.1440.025	NINA AYU SAFITRI 246.NIN	HAK KEPERDATAAN ANAK DILUAR KAWIN PASKA PUTUSAN MK NO.46/PUU-VII/2010	2017
247)	2013.1440.063	DWI NURGIANTO 247.DWI	KAJIAN YURIDIS SURAT KEPUTUSN GUBERNUR DKI JAKARTA NO 2238 TAHUN 2014 BERDASARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 193/G/LH/2015/PTUN-JKT)	2017
248)				
249)	2013.1440.012	ROFSANJANI ALI AKBAR 249.ROF	KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV TAHUN 2017 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD (AMBANG BATAS)	2019
250)	2015.1440.027	HIJROTUL ARSHADAH 250.HIJ	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PHK KARENA MENJALANKAN IBADAH	2019
251)	2015.1440.008	BAGUS REVI SUDIANTO 251.BAG	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI	2019
252)	2015.1440.034	MUHAMMAD HAMKA AL FITROH 252.MUH	ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMBUBARAN ORMAS MELALUI PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017	2019
253)	2015.1440.025	FITRI FITMASARI 253.FIT	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL	2019

254)	2015.1440.019	NUR AMALIA 254.NUR	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG KEHILANGAN HAK CUTI HAID	2019
255)	2015.1440.076	INGESTI SHAILINA 255.ING	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR 1/PEN.KONSY 2017/PN.RTG TENTANG KONSINYASI	2019
256)	2015.1440.005	DIAN NOORHAYATI 256.DIA	PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMALSUAN LABELISASI HALAL	2020
257)	2016.1440.079	MOHAMMAD NAIM 257.MOH	AKSESIBILITAS HAK ATAS PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA	2020
258)	2016.1440.078	AHMAD HELMI LUQYANA 258.AHM	KEWENANGAN DEAN PENGAWAS KPK DITINJAU PADA UNDANG-UNDNAG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI	2020
259)	2016.1440.066	RIZKI ARIEF KURNIAWAN 259.RIZ	LEGALITAS TRADISI GADUH BAGI HASIL HEWAN TERNAK PADA MASYARAKAT TRADISIONAL SEKITAR DESA HUTAN	2020
260)	2016.1440.052	VIRA IRVAYU PUTRIANTO 260.VIR	TUNTUTAN PIDANA OLEH NASABAH ATAS BOCORNYA RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK KONSUMEN	2020
261)	2016.1440.089	SITI ALFIYAH 261.SIT	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KELOMPOK DENGAN SISTEM TANGGUNGJAWAB	2020
262)	2016.1440.056	SHOKIBU 262.SHO	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA DI BIDANG KONSTRUKSI	2020
263)	2016.1440.007	RR.FARAH AUDINA AZIZAH 263.FAR	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG TIDAK SENGAJA MEMBAWA NARKOTIKA	2019
264)	2016.1440.012	AMIRIA KHUSNA HATI 264.AMI	UPAYA HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	2020
265)	2016.1440.048	JENRISON NAINGGOLAN 265.JEN	LEGALITAS TANAH HAK YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN	2020

266)	2016.1440.022	FATHURROHMAN AS SYAIKHUL ISLAM 266.FAT	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA	2020
267)	2015.1440.014	MOH. SYIHABBUDIN 267.MOH	ANALISIS HUKUM HAK WARGA NEGARA ASING DALAM PEMILU	2020
268)	2016.1440.101	ERDIANSYAH KRISNA ADITYA 268.ERD	HAK KREDITOR TERHADAP DEBITOR ATAS KETERLAMBATAN MENGAJUKAN TAGIHAN YANG MELEBIHI BATAS WAKTU PADA PROSES PAILIT	2020
269)	2016.1440.019	NUR AFNI DEWI SUSANTI 269.NUR	EKSEKUSI JAMINAN ATAS AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGJAN YANG TIDAK DI DAFTARKAN	2020
270)	2016.1440.084	ABD. HALIM 270.ABD	EKSISTENSI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DI PEMERINTAH DESA	2020
271)	2016.1440.079	MOHAMMAD NAIM 271.MOH	AKSEbilitAS HAK ATAS PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA	2020
272)	2016.1440.071	DEVI SRI AGUSTIN 272.DEV	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG LINTAS BATAS NEGARA	2020
273)	2016.1440.027	FARADILA NOVITASARI 273.FAR	JURNAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN	2020
274)	2016.1440.092	KUSNUL NABILAH 274.KUS	JURNAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TEMPAT KERJA	2020
275)	2016.1440.028	ANAS SANTOSO 275.ANA	JURNAL EKSISTENSI DEWAN PENGUPAHAN DALAM PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM	2020
276)	2016.1440.072	HASAN AL-MUNIR 276.HAS	JURNAL EKSISTENSI ALAT BUKTI FOMAL DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	2020
277)	2016.1440.032	ANISA 277.ANI	PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN BADAN	2020

278)	2016.1440.078	AHMAD HELMI LUQYANA 278.AHM	KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DITINJAU PADA UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI	2020
279)	2015.1440.043	SYAUQI FIRDAUS 279.SYA	UPAYA HUKUM ATAS DEBITUR PINJAMAN ONLINE YANG IDENTITASNYA TERSEBARKAN	2020
280)	2013.1440.013	SITI KOTIMAH 280.SIT	TANGGUNG GUGAT PROFESI NOTARIS ATAS AKTA FIKTIF	2020
281)	2015.1440.021	FIRMAN WAHYUDI 281.FIR	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KARYA CIPTA SENI BATIK	2020
282)	2016.1440.088	HADI RUSLI 282.HAD	JURNAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR KUARSA ILEGAL	2020
283)	2017.1440.058	FADIA SALSABILLA 283.FAD	JURNAL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI MEDIA SOSIAL	2021
284)	2017.1440.022	DISCA HASANIA 284.DIS	JURNAL KEABSAHAN DOKUMEN BERHARGA SEBAGAI JAMINAN DALAM HUBUNGAN KERJA	2021
285)	2017.1440.092	SAMI'AN 285.SAM	JURNAL ANALISIS POLITIK HUKUM PENGARUH OLIGARKI DAN BUDAYA KORUPSI DI KABUPATEN BANGKALAN	2021
286)	2017.1440.065	AULIA JIHAN RIFANI 286.AUL	JURNAL INDEPENDENSI PERADILAN MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	2021
287)	2017.1440.017	IDRUS SALAM 287.IDR	JURNAL ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR SWASTA	2021
288)	2015.1440.038	BAHRUL ULUM 288.BAH	PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA ASING ATAS PERJANJIAN NOMINE (ATAS NAMA)	2020
289)	2015.1440.013	RAUF WAHAR 289.RAU	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN DANQA INTERNASIONAL	2020

290)	2017.1440.099	ADI RISKI SETYAWAN 290.ADI	SANKSI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA	2020
291)	2015.1440.041	LAILY RODHIYATUL HABIBAH 291.LAI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS INDONESIA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL	2020
292)	2016.1440.084	ABD.HALIM 292.ABD	EKSISTENSI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DI PEMERINTAHAN DESA	2020
293)	2016.1440.014	HENDRI KUSYANSYAH 293.HEN	PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009	2020
294)	2016.1440.043	ZULFI MAULANA BISRI 294.ZUL	PENJATUHAN SANKSI PIDAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME	2020
295)	2016.1440.002	KUKUH DWI PRASETYO 295.KUK	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	2020
296)	2016.1440.077	FAIZAL RACHMANSYAH 296.FAI	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS MEDIS (ICRC) YANG TERTEMBAK DALAM KONFLIK BERSENJATA	2020
297)	2016.1440.070	AHMAD TAUFIQ 297.AHM	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS	2020
298)	2016.1440.045	WAHYU BUDIANTO 298.WAH	ANALISIS PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN TERKAIT RADIUS PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN DI PERHUTANI	2020
299)	2016.1440.009	I PUTU CANDRA WARDANA 299.PUT	TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT (PERSEROAN TERBATAS) SEBAGAI PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN DALAM KECELAKAAN MEDIS	2020
300)	2016.1440.052	VIRA IRVAYU PUTRIANTO 300.VIR	TUNTUTAN PIDANA OLEH NASABAH ATAS BOCORNYA RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK KONSUMEN	2020
301)	2016.1440.051	NUR HASAN 301.NUR	HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2020

302)	2016.1440.086	SITI MASKHUNATIN 302.SIT	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK KARENA PELANGGARAN KLAUSULA PKWT	2020
303)	2016.1440.054	AGUS HARIYANTO 303.AGU	PRA PERADILAN REG.PERKARA : NO 46/PRA.PER/2016/PN.SBY ATAS PENETAPAN TERSANGKA SALAH TANGKAP DENGAN SURAT PENANGKAPAN YANG MENGANDUNG HUMAN EROR TYPING	2020
304)	2016.1440.074	DIKA BAKHTIAR BAGUS PERMANA 304.DIK	KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM MENGAWASI PILKADA 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019	2020
305)	2017.1440.047	NIAHIROTUL HASANAH 305.NIA	KEJAHATAN GENOSIDA KULTURAL : BERDASARKAN ANALISA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL	2021
306)	2017.1440.089	MUHAMMAD REFOR BASUKI 306.MUH	EKSISTENSI TENAGA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	2021
307)	2016.1440.041	ROMIZ DHIYAUL HAQ 307.ROM	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI	2021
308)	2017.1440.011	IENESIA DELLA FARAGIL 308.IEN	PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI LIBYA	2021
309)	2017.1440.059	RANI KUSUMA WARDANI 309.RAN	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA	2021
310)	2017.1440.060	LUKIS SETIANI 310.LUK	EKSAMINASI PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	2021
311)	2017.1440.051	RIDHO AUDI PRATAMA 311.RID	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA ONLINE	2021
312)	2017.1440.098	SENO SUGIHARTO 312.SEN	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM LAYANAN TEKNOLOGI FINANSIAL BERBASIS PEER TO PEER LANDING DI INDONESIA	2021
313)	2017.1440.054	RAHMAN TIMUNG 313.RAH	KEDUDUKAN KEJAKSAAN DAN PENGISIAN JABATAN JAKSA AGUNG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	2021

314)	2017.1440.035	ASMAUL KHUSNAH 314.ASM	PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	2021
315)	2017.1440.087	FATHURIZAL HUSNI MUHARRAM 315.FAT	ANALISIS PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS/2020/PT.DPS KASUS I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX SID TERKAIT UJARAN KEBENCIAN IDI KACUNG WHO	2021
316)	2017.1440.104	MOH. JATIM 316.MOH	ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF ASA CONTARIUS ACTUS DALAM NEGARA HUKUM	2021
317)	2017.1440.024	DEBBY FITRIAN SURYA LAKSMANA 317.DEB	PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN	2021
318)	2017.1440.026	AHMAD KHOIRUN NI'AM 318.AHM	UPAYA MEWUJUDKAN PEMULIAAN PROFESI SATUAN PENGAMANAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 4 TAHUN 2020	2021
319)	2017.1440.066	HABIBU BURHANUDDIN SULTHON 319.HAB	ANALISIS DAMPAK DARI JALAN RUSAK YANG MENGAKIBATKAN JATUHNYA KORBAN PENGGUNA JALAN AKIBAT DARI KELALAIAN PEMERINTAH	2021
320)	2017.1440.079	WULAN AFRIANTI 320.WUL	PENGATURAN BATAS WAKTU MASA KERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020	2021
321)	2017.1440.038	FITRIAH AGUNG SABDA PAMUNGKAS 321.FIT	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19	2021
322)	2017.1440.071	TIARA YAHYA DERMAPATI 322.TIA	PERADILAN IN ABSEBTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK PEMBELAAN TERDAKWA DALAM PERSPEKTIF HAM	2021
323)	2017.1440.048	ASIS 323.ASI	THE LEGAL POSITION OF THE KPK AS AN INDEPENDENT ANTI-CORRUPTION AGENCY IN INDONESIA: A REVIEW IN LAW NO.19 OF 2019 AND UNCAC	2021
324)	2017.1440.005	SURIYANTO 324.SUR	STATUS HUKUM PERATURAN DESA DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2011 SERTA FUNGSU BPD SEBAGAI MITRA KEPALA DESA	2021
325)	2017.1440.025	VIONA SHAFIRA VIOLETA ABDULLAH 325.VIO	KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UU ITE	2021

326)	2017.1440.101	WIWIK AFIDAH 326.WIW	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA	2021
327)	2017.1440.056	MEGA YANWAR HUSNU ROMADLON 327.MEG	PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) ATAS PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR: 41/G/2019/PTUN.SBY TANGGAL 05 SEPTEMBER 2019 JO PUTUSAN PT TUN SURABAYA NOMOR: 247/B/2019/PT.TUN.SBY TANGGAL 10 DESEMBER 2019	2021
328)	2017.1440.075	AGUS SETIAWAN 328.AGU	PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA ATAS DIJAMINKANNYA OBJEK FIDUSA DALAM EKSEKUSI MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA	2021
329)	2017.1440.057	MOCHAMMAD RAFLI MAULIDI 329.MOC	PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN E-COMMERCE TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	2021
330)	2017.1440.023	LENNY MAULANI 330.LEN	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH PENGGANTI KARENA HILANG	2021
331)	2017.1440.036	FAISAL AZIS MUTAQIEN 331.FAI	PENERAPAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL ERA PANDEMI COVID-19	2021
332)	2017.1440.083	NUR QOMARIAH 332.NUR	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19	2021
333)	2017.1440.004	PRASETYA AGUNG WIWOHO 333.PRA	REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN BAGI PECANDU NARKOTIKA	2021
334)	2017.1440.010	SABITA FIRGORIA LUISA EDON 334.SAB	KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA	2021
335)	2017.1440.096	FAJRIL SABRI 335.FAJ	PENAHLANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN	2021
336)	2017.1440.090	DINDA LESTARI BUNGA 336.DIN	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TNI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT	2021
337)	2015.1440.026	EDWIN BUDIawan 337.EDW	PERGESERAN NILAI BUDAYA CAROK DI MADURA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	2021

338)	2016.1440.055	ANIQOTUN NAFIAH 338.ANI	LEGAL DISCOURSE: RESOLVING SIMULTANEOUS REGIONAL HEAD ELECTION POLEMICS IN THE MIDST OF COVID-19 PANDEMIC	2021
339)	2017.1440.034	SURYADI 339.SUR	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENAGIH HUTANG MELALUI MEDIA SOSIAL	2021
340)	2017.1440.003	SENO WIDYA PRATAMA 340.SEN	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME	2021
341)	2017.1440.020	LAILATUL FITRIYA ADHANI 341.LAI	LELANG JABATAN SEBAGAI Inova andSI DALAM MEKANISME REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	2021
342)	2017.1440.030	AULYA DWISUDARINI 342.AUL	TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEBIRU KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	2021
343)	2017.1440.050	ANDI SHAVIRA PRASETYAWARDANI 343.AND	TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KARENA PEMBELAAN TERPAKSA	2021
344)	2017.1440.074	PUTRI AYU ANGGRAINI 344.PUT	ERROR PERSONA DALAM GUGATAN PERSELISIHAN HAK DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	2021
345)	2017.1440.018	ROUDATUL WADIAH 345.ROU	ANALISIS HUKUM KEABSAHAN E-SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI DOKUMEN NEGARA	2021
346)	2017.1440.032	EDY SOFIAN 346.EDY	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA (STUDI KASUS DI KALIJUDAN)	2021
347)	2017.1440.042	ROHMAH HASANAH 347.ROH	PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ABORSI KORBAN PERKOSAAN DALAM HUKUM INDONESIA	2021
348)	2017.1440.088	SEB NOFEM SITI ACHIROTIN 348.SEB	KEABSAHAN HIBAH ORANGTUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT	2017
349)	2017.1440.002	SAFIRA AZARINE LUTFIYAH SOEPRIANTO 349.SAF	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK	2021

350)	2017.1440.024	ARNOLDI 350.ARN	PRAKTEK BOEDEL PAILIT DI INDONESIA	2020
351)	2016.1440.028	ANAS SANTOSO 351.ANA	EKSISTENSI DEWAN PENGUPAHAN DALAM PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM	2020
352)	2016.1440.029	APRILIA ULFA S. PUTRI 352.APR	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	2020
353)	2015.1440.031	SUNARDI 353.SUN	KEBIJAKAN PEMERINTAH MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR SWASTA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	2020
354)	2016.1440.044	IMAN ZUKHRIFI NUR AZZAM 354.IMA	KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENERBITKAN SURAT IJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH	2020
355)	2016.1440.046	IFFAN NUR HIDAYAT 355.IFF	PEMIDANAAN YANG DIPAKSAKAN (KRIMINALISASI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT	2020
356)	2016.1440.047	IRFAN MUCHAMAD GHOZALI 356.IRF	KEDUDUKAN HUKUM TANAH NEGARA DALAM PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN	2020
357)	2015.1440.048	ADHAM MAULANA PRAWIRA 357.ADH	HAK PEKERJA YANG DI PHK KARENA PERUSAHAAN PAILIT	2020
358)	2016.1440.052	VIRA IRVAYU PUTRIANTO 358.VIR	TUNTUTAN PIDANA OLEH NASABAH ATAS BOCORNYA RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK KONSUMEN	2020
359)	2016.1440.060	SILVIA AGUSTIN SUYANDI 359.SIL	PENEGAKAN PIANA KETENAGAKERJAAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	2020
360)	2016.1440.069	ERY FEBRIANTY 360.ERY	PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH	2020
361)	2016.1440.072	HASAN AL-MUNIR 361.HAS	EKSISTENSI ALAT BUKTI FOMAL DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	2020

362)	2016.1440.075	MIZANI ALAM SEMESTA 362.MIZ	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI	2020
363)	2016.1440.080	MUHAMMAD DIKSA NURAKSA 363.MUH	HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	2020
364)	2016.1440.089	SITI ALFIYAH 364.SIT	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KELOMPOK DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG	2020
365)	2017.1440.001	ALDIANSAH PRATAMA 365.ALD	KEABSAHAN PEMERINTAH ATASAN SECARA LISAN ATAS PENGHILANGAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN DAN UPAH LEMBUR	2021
366)	2017.1440.013	KAHARUDIN PUTRA SAMUDRA 366.KAH	HAK PEKERJA YANG DI PHK SEBELUM MASA KONTRAK BERAKHIR	2021
367)	2017.1440.014	DIO APRILIANTO 367.DIO	HAK PEKERJA YANG DI PHK KARENA EFISIENSI PADA MASA PANDEMI COVID DAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	2021
368)	2016.1440.036	OKI DANISWARA 368.OKI	PENERAPAN SANKSI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PARA PENGGUNA NARKOTIKA	2021
369)	2015.1440.039	MIRZA ANATASWARA PERDANA 369.MIR	HAK AHLI WARIS YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA (HILANG) MENURUT HUKUM WARIS ISLAM	2021
370)	2017.1440.046	KARTIKO ADI SASMITO 370.KAR	PERLINDUNGAN STATUS PEKERJA DENGAN PKWT YANG MENGALAMI REKONTRAK	2021
371)	2016.1440.063	INNEKE FAUZIA ROCHMA 371.INN	KEKUATAN MENINGKAT ANJURAN TERTULIS DINAS KERJA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	2021
372)	2017.1440.052	ARI ARDIANTO 372.ARI	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUGURAN KANDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL	2021
373)	2017.1440.064	MEYDITA RISKA WATI 373.MEY	EKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH	2021

374)	2013.1440.025	NINA AYU SAFITRI 374.NIN	HAK KEPERDATAAN ANAK DILUAR NIKAH KAWIN PAKSA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010	2017
375)	2013.1440.020	M. AGUS WIYONO 375.AGU	KEABSAHAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF	2017
376)	2013.1440.023	FADLI 376.FAD	KEABSAHAN SUKBYEK HUKUM DALAM SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK ATAS TANAH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH	2017
377)	2013.1440.012	ROFSANJANI ALI AKBAR 377.ROF	KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV TAHUN 2017 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD (AMBANG BATAS)	2019
378)	2016.1440.029	APRILIA ULFA S. PUTRI 378.APR	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	2020
379)	2016.1440.075	MIZANI ALAM SEMESTA 379.MIZ	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI	2020
380	2014.1440.109	SATITI BANGUN RESPATI 380.SAT	TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH KOTA SURABAYA ATAS RUSAKNYA BARANG AKIBAT AKAR POHON MILIKNYA	2018
381	07.120.149	TAUFIK BAHARUDDIN HAYADE 381.TAU	TINJAUAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) KONTEKSTUALNYA TERHADAP PERILAKU BUDAYA HUKUM DIKALANGAN PENGGUNA INTERNET	2010
382	2014.1440.061	SUBHAN AMIN 382.SUB	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	2022
383	2016.1440.082	MUH ANUGERAH LATJENO 383.MUH	EKSISTENSI PIDANA MATI BAGI PELAKU KORUPSI PADA SAAT BENCANA	2022
384	2017.1440.062	MEILIANA NURCAHYANI 384.MEI	PERLINDUNGAN ANAK YANG TERLIBAT KASUS PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014	2022
385	2018.1440.001	OLIVIANA DWI PUTRI 385.OLI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA SERIKAT PEKERJA ATAS PENGURUS SERIKAT PEKERJA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN	2022

386	2018.1440.002	ABDUL AZIS ZAIN 386.ABD	PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KEPULAUAN KANGEAN	2022
387	2018.1440.003	LINA 387.LIN	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ASET MILIK PT KAI OLEH PIHAK KETIGA DI DAOP VIII SURABAYA	2022
388	2018.1440.008	UBAIT KURNIAWAN AZIZ 388.UBA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NIK/ KK UNTUK REGISTRASI KARTU TELEPON SELULER SECARA ILEGAL	2022
389	2018.1440.009	ALIFA RIZQI FAJRIANI 389.ALI	PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA	2022
390	2018.1440.013	SATRIA NENDA EKA SAPUTRA 390.SAT	OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA	2022
391	2018.1440.015	NOFITA NURUL HIDAYATULLOH 391.NOF	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN SEDARAH YANG MELAKUKAN ABORSI	2022
392	2018.1440.016	YUSROTUL IZZA AMALIA 392.YUS	RIGHT PERSONAL OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE WITH DISABILITIES NATIONAL INDONESIA	2022
393	2018.1440.018	ANASYA SAVITRI 393.ANA	JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR	2022
394	2018.1440.019	IDA NURIYA FATMAWATI 394.IDA	HAK PEKERJA ATAS PENERIMAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA SAAT PEKERJA BELUM MENCAPIAI USIA 56 TAHUN	2022
395	2018.1440.021	TAREQ JATI PAMUNGKAS 395.TAR	TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL PERSEPEKTIF NEGARA WELFARE STATE	2022
396	2018.1440.023	ADE DWI APRILIA 396.ADE	ANALISIS YURIDIS ONRECHTMATIGE DAAD ATAS JAMINAN SERTIFIKAT TANAH YANG TELAH DIALIHKAN SEBELUM TERJADI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG	2022
397	2018.1440.026	GINAH ZULFA ATIKA 397.GIN	PERTANGGUNGAN JAWABAN DALAM PERBUATAN EIGENRICHTING (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 263/PID.B/2019/PN. BGR DAN PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN)	2022

398	2018.1440.028	NOVY YANDARI NURLAILY 398.NOV	"PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KASUS PASCA DITERAPKANNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DAN PENGARUHNYA DALAM RUANG LINGKUP PT. SIER"	2022
399	2018.1440.029	LINDA MEILANI DJUWIAH PUTRI 399.LIN	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN(LEGAL PROTECTION AGAINST STUDENT VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL ABUSEMENT)	2022
400	2018.1440.030	KHOIRIAH 400.KHO	PELECEHAN SEKSUAL PADA PEKERJA DI TEMPAT KERJA	2022
401	2018.1440.034	DWI RAHAYU 401.DWI	ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	2022
402	2018.1440.045	SUPRIYONO 402.SUP	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS KEBAKARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS KEBAKARAN LAPAS KELAS I TANGERANG (CRIMINAL LIABILITY IN PRISON FIRE CASES: A CASE STUDY OF CLASS I TANGERANG PRISON FIRE)	2022
403	2018.1440.048	AULIA VIRGISTASARI 403.AUL	PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN DITINJAU DARI PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021	2022
404	2018.1440.049	MAYA NOVIRA PURWANTI 404.MAY	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	2022
405	2018.1440.050	KHOIROTUL UMMAH ANDRIANA 405.KHO	LEGAL PROTECTION FOR NOTARIES IN THE MAKING OF A DEED BASED ON FALSE INFORMATION FROM THE PARTIES	2022
406	2018.1440.051	DEWI RAHAYU 406.DEW	PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALUTSISTA	2022
407	2018.1440.052	SOFIYA NUR SAFITRI 407.SOF	ATURAN HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN JARING TRAWL	2022
408	2018.1440.053	NADIEF RAHMAN HARRIS 408.NAD	PENERAPAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUAATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.	2022
409	2018.1440.054	ZOLA AGUSTINA 409.ZOL	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN DIAGNOSA OLEH DOKTER HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANAK DALAM KANDUNGAN	2022

410	2018.1440.057	RINDI APRILANTI 410.RIN	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KUASA ANGGARAN PADA REFOCUSING CORONA VIRUS DISEASE 19	2022
411	2018.1440.058	RAMADHANI MAGHFIRAHTUL FITRI 411.RAM	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERDAGANGAN ONLINE	2022
412	2018.1440.059	DACHIROTUS SA'DIYAH 412.DAC	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MEMBUKA RAHASIA REKAM MEDIS PASIEN COVID19	2022
413	2018.1440.060	ALFIN ASLICHATUL UMMAH 413.ALF	AN EXISTENCE OF COMPENSATION MONEY FOR WORKERS AT THE END OF STWA	2022
414	2018.1440.062	ACHMAD IFAN 414.ACH	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	2022
415	2018.1440.063	CLISA PRAMEsti YUDYANINGARUM 415.CLI	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIS	2022
416	2018.1440.067	VAVIROTUS SHOLICAH 416.VAV	ANALISIS KEADAAN TERTENTU TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI: STUDI KASUS KORUPSI BANSOS COVID-19	2022
417	2018.1440.068	NICO SETYO HENDRAWAN 417.NIC	PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA RODA DUA YANG MENGGUNAKAN PONSEL SAAT BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA	2022
418	2018.1440.072	NICO AGUS WIJAYA 418.NIC	PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KAB.BANGKALAN (STUDI PADA POLRES BANGKALAN)	2022
419	2018.1440.080	MOHAMMAD AULIA RAHMAN 419.MOH	TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH LUMAJANG)	2022
420	2018.1440.085	ROUDETUL JENNNAH 420.ROU	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA PELAKU EKSPLOITASI ANAK UNTUK KONTEN MEDIA SOSIAL	2022
421	2018.1440.088	DIYAN SEJAROT 421.DIY	KONFLIK AGRARIA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM "STUDI KASUS DESA WADAS PURWOREJO"	2022

422	2018.1440.089	RAHMADANY JIYAN PUSPITASARI 422.RAH	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN ONLINE SHOP MERUJUK PADA UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016	2022
423	2018.1440.103	AHMAD BAHRUL EFENDI 423.AHM	ANALISIS YURIDIS GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DALAM KONFLIK LINGKUNGAN WADUK SEPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 200/PDT.G/2019/PN. SBY JO NO. 544/PDT/2020/PT)	2022
424	2018.1440.104	BAMBANG TRIANTO 424.BAM	ANALISIS HUKUM TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI MASSA: TINJAUAN HAM	2022
425	2019.1440.063	SARAYA HUSNA 425.SAR	TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) BAGI PENGGUNA JASA AKIBAT BARANG YANG RUSAK/HILANG SELAMA PROSES PENGIRIMAN MELALUI LAUT	2022
426	2019.1440.076	FIKRI IMAN FIRMANSYAH 426.FIK	PERTANGGUNGJAWABAN AGRESI MILITER RUSIA TERHADAP UKRAINA DI WILAYAH DONBASS	2022
427	20191440058	BUDI NURCAHYO 427.BUD	PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN ROYAL TI KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA BUKU	2023
428	20181440012	ALKHAWI NOERMATIN S. 428.ALK	ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA UNDANGAN UNDANGAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA	2023
429	20161440034	IWAN WIDI SETIAWAN 429.IWA	PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE BAGI PENGGUNA JASA PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009	2022
430	20181440005	YUNIVA 430.YUN	PERTANGGUNG JAWBAN PIDANA DOKTER YANG MEMALSUKAN DATA KESEHATAN PASIEN	2022
431	20181440106	BABY CHRISTINA MARTASARI RUDOLF WILLEMS 431.BAB	PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN INVASI ATAS RUSIA KE UKRAINA TAHUN 2022	2022
432	20181440009	ALIFA RIZQI FAJRIANI 432.ALI	PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMINDANAAN DI INDONESIA	2022
433	20181440010	DEVI SHALSABILA ATIKA DJATMIKO 433.DEV	KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA	2022

434	20181440018	ANASYA SAVITRI 434.ANA	JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR	2022
435	20181440031	DIMAS ADE PRAYOGO 435.DIM	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA	2022
436	20181440038	ERIKA SUKMAWATI 436.ERI	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG KABUR PADA SAAT KARANTINA COVID-19 : STUDI KASUS RACHEL VENNYA	2022
437	20181440062	ACHMAD IFAN 437.ACH	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP	2022
438	20181440091	ZENIZA MAR AZIZANA 438.ZEN	PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	2022
439	20181440092	NOVIAN ANGGA SAPUTRA 439.NOV	TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DAN HAK ASASI MANUSIA	2022
440	20181440093	RAHADIAN IRHAMIL HAQQI AL IRSYAD 440.RAH	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE BARANG TIDAK SESUAI	2022

Surabaya, 18 Desember 2023

Mengetahui,

Kepala Perpustakaan



Drs. Yarno, M.Pd.